

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR
24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KILOGRAMBERSUBSIDI SECARA
TERTUTUP DI KECAMATAN DANAU PANGGANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus: Desa Longkong dan Desa Bitin)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

LAMIAH

NPM: 2022300

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : LAMIAH

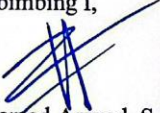
NPM : 2022300

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

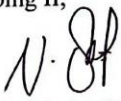
JUDUL : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN SECARA TERTUTUP DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA LONGKONG DAN DESA BITIN)**

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,



Muhammad Arsyad, S.Pd.I, M.A.P.
NUPTK. 5636753654130102

Amuntai, 02 Februari 2026
Pembimbing II,


Nida Urahmah, M.Pd.
NUPTK. 6935767668230302



Mengetahui
Plt. Ketua Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah, atas Rahmat dan Hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus: Desa Longkong dan Desa Bitin)"**. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pemikiran dan pemberian data-data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran serta tanggapan yang sifatnya membangun agar penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini. Penulis dalam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian,S.Sos.,M.AP, CIQar, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., MA. Selaku Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik.

3. Bapak Muhamad Arsyad, S.Pd.I. M.AP. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.
4. Ibu Nida Urahmah, M.Pd, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahamannya.
6. Seluruh keluarga yang sudah memberi semangat dan do'a nya dalam pembuatan proposal skripsi ini.
7. Kepada Kepala Desa Longkong yang telah memberikan izin dalam proses penelitian berlangsung.
8. Kepada Kepala Desa Bitin yang telah memberikan izin, dan kemudahan akses data selama proses penelitian berlangsung.
9. Kepada Pangkalan Desa Longkong yang telah bersedia meluangkan waktu.
10. Kepada Pangkalan Desa Bitin yang telah membantu penulis selama proses pengumpulan data.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Tipe Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Desain Operasional Penelitian	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisa Data	42
H. Uji Kredibilitas Data	44
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 3.2 Desain Operasional	40
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kecamatan Danau Panggang	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Longkong.....	50
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Desa Longkong.....	50
Tabel 4.4 Mata Pencarian Desa Longkong	51
Tabel 4.5 Data Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Longkong	52
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Bitin	60
Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Desa Bitin	60
Tabel 4.8 Mata Pencarian Desa Bitin.....	61
Tabel 4.9 Data Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bitin.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Longkong	53
Gambar 4.2 Struktur BPD Desa Longkong.....	54
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bitin.....	63
Gambar 4.2 Struktur BPD Desa Bitin	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melimpahnya sumber daya alam dan mineral di Indonesia bisa dikategorikan ada beberapa sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada yang tak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tak diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan penggunaannya lebih banyak dari pada prosesnya karena digunakan secara terus-menerus. Ambil contoh mineral yang sulit untuk diperbaharui adalah minyak bumi dan LPG yang memerlukan waktu sangat lama untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan LPG umumnya berasal sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan.

Minyak bumi berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan komposisi dan kemurniaannya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat pengilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin dan minyak tanah sampai aspal. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan mineral yang dibutuhkan manusia, salah satunya adalah LPG.

Kita tentunya sering mendengar istilah LPG dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga pastilah tidak asing lagi buat mereka, karena LPG ini akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. LPG merupakan singkatan dari Liquefied Petroleum Gas atau biasanya sering disebut LPG. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Pendistribusian LPG 3 Kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur atau biasanya disebut dengan pangkalan LPG 3 kg.

LPG 3 Kg adalah salah satu komoditas migas yang yang di produksi oleh PT. Pertamina yang disubsidikan oleh pemerintah agar para konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG sebagai pengganti minyak tanah, selain bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga juga bisa menekan subsidi BBM yang selama ini ditanggung APBN, selain itu pemakaian LPG 3 kg tidak menimbulkan polusi yang berlebihan. Program konversi minyak tanah bagi masyarakat golongan ekonomi bawah. LPG diharapkan bisa membantu masyarakat golongan bawah menghemat pengeluaran dengan penggunaan LPG dan mampu mengganti kelangkaan minyak tanah. Sebagai inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, sehingga masyarakat tidak akan terfokus pada satu bahan bakar. Dalam menjalankan kebijakan penggunaan LPG pemerintah harus membuat kebijakan agar pendistribusian LPG 3 kg merata dan sesuai.

Pendistribusian LPG 3 kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur LPG 3 kg atau biasanya juga disebut dengan pangkalan LPG 3 kg. Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam proses pendistribusian terdapat koordinasi antara PT.Pertamina (Persero) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. PT. Pertamina bertindak sebagai penyedia dan bertanggung jawab dalam proses pendistribusian hingga kepada konsumen, sedangkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan, pembinaan distribusi LPG 3 kg, dan mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Program konversi dari minyak tanah ke LPG ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 Kg, serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi secara tertutup.

Distribusi LPG 3 Kg di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada berapa penjelasan distribusi sebagai berikut:

1. Sistem dan Jalur Penyaluran LPG

Distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Danau Panggang mengikuti sistem distribusi tertutup yang berlaku secara nasional, dengan jalur resmi sebagai penyaluran Utama (Agen ke Pangkalan) LPG 3 kg didistribusikan dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) ke Agen resmi Pertamina, kemudian dari Agen disalurkan ke Pangkalan resmi LPG 3 kg yang tersebar di wilayah Kecamatan Danau Panggang. Kecamatan Danau Panggang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang sebagian wilayahnya memiliki akses transportasi sungai atau air yang signifikan. Menurut informasi dari Hulu Sungai Utara, penyaluran untuk daerah terpencil seperti Kecamatan Danau Panggang sering kali dilakukan melalui Desa Bitin sebagai titik transit. Ini menunjukkan adanya tantangan logistik, di mana pengantaran mungkin hanya sampai di Desa Bitin (dengan mobil Agen), dan dilanjutkan ke Desa Longkong menggunakan transportasi air.

2. Penetapan Harga LPG 3 kg Bersubsidi

Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, harga eceran tertinggi di pangkalan sekitar Rp18.500 per tabung (berdasarkan data tahun 2025). Pangkalan wajib menjual sesuai HET yang ditetapkan ini dan menempelkan papan informasi HET. Meskipun penjualan LPG 3 kg idealnya berakhir di pangkalan, kenyataannya pengecer masih

menjadi rantai distribusi. Di wilayah Hulu Sungai Utara, harga di tingkat pengecer bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp28.000 per tabung untuk daerah yang sulit dijangkau seperti Danau Panggang, atau daerah yang lebih jauh seperti Paminggir. Harga yang melebihi batas maksimal ini dianggap melanggar aturan.

3. Pengawasan dan Kendala Distribusi

Pengawasan untuk memastikan LPG 3 kg hanya dibeli oleh masyarakat kurang mampu dan Usaha Mikro, bukan oleh Konsumen Industri/Perusahaan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN, TNI, POLRI. Kendala masih adanya konsumen dari kalangan mampu yang membeli LPG 3 kg, mengurangi ketersediaan bagi kelompok sasaran. Secara ringkas, distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Danau Panggang diupayakan mengikuti mekanisme resmi Pertamina dan regulasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara, namun pengawasan di tingkat pengecer menjadi faktor utama yang memengaruhi kestabilan harga dan ketepatan sasaran.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup

1. LPG tabung 3 kg adalah LPG yang diisi dalam tabung berat isi 3 kg.
2. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan dan penanganannya yang ada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya.

3. Pengguna LPG tabung 3 kg bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 kg sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
4. Sistem pendistribusian tertutup adalah sistem pendistribusian LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu yang terdaftar dengan kartu kendali.
5. Kartu kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tertentu.
6. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro.
7. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 kg.

Berdasarkan Observasi di Lapangan pada Desa Longkong banyak indikasi yang menunjukkan bahwa masih terjadi masalah yaitu:

1. Lambatnya penyaluran LPG 3 kg ke Desa Longkong yang mengakibatkan permintaan untuk LPG 3 kg sangat tinggi dan menyebabkan masyarakat terpaksa harus membeli kepada pengecer dengan harga yang relative mahal dan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)
2. Tidak tepat sasaran LPG 3 kg di Desa Longkong karena sering kali dibeli oleh pihak yang tidak berhak, seperti rumah tangga mampu atau usaha. Hal

ini terjadi karena tidak adanya sistem pendataan atau verifikasi yang efektif di tingkat Desa Longkong. Pangkalan Desa Longkong sering melayani pembeli mana pun tanpa memverifikasi apakah mereka berhak menerima subsidi. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)

3. Penjualan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Namun, di pangkalan Desa Longkong sering menjual dengan harga lebih tinggi disebabkan oleh biaya transportasi tambahan atau kesempatan untuk mencari keuntungan lebih. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)

Berdasarkan Observasi di Lapangan pada Desa Bitin banyak indikasi yang menunjukkan bahwa masih terjadi masalah yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai kebijakan LPG 3 kg bersubsidi sehingga masih terdapat pangkalan yang menjual dan memberikan jatah LPG 3 kg kepada pihak pengecer. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)
2. Kurangnya partisipasi pengawasan dari konsumen membuat masyarakat Desa Bitin cenderung menerima harga tinggi LPG 3 kg dari pada melaporkan atau mencari pangkalan resmi. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)
3. Masyarakat Desa Bitin sering kali membeli LPG 3 kg Tidak menggunakan kartu kendali karena pangkalan tidak memahani peraturan. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)

Berdasarkan fenomena masalah di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus: Desa Longkong dan Desa Bitin)**

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian yaitu Teori Jan Merse (Reno Affrian ,2023:47-48)

1. Informasi
2. Isi Kebijakan
3. Dukungan Masyarakat
4. Pembagian Potensi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Beesubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin)?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin)?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah di atas, tujuan yang handak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin)
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin)

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dibidang Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengawasan untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh rumah tangga miskin dan usaha mikro di Desa Longkong dan Desa Bitin, bukan diselewengkan oleh pihak yang tidak berhak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi warga miskin dan usaha mikro tidak kesulitan mencari LPG dengan adanya pasokan stabil karena dipantau tidak ada penimbunan.

c. Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini memberikan pengawasan secara rutin dan melaporkan masalah di lapangan dan menyelesaikan masalah tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian membutuhkan tinjauan penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Annisa Tasya Bella (2023) Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan BanjarMasin dalam skripsinya yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan LPG 3 Kg Di Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin**”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap penggunaan LPG 3 kg di Kelurahan Telaga Biru, Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada teori implementasi kebijakan oleh Ripley dan Franklin (1982). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah terhadap penggunaan LPG 3 kg di Kelurahan Telaga Biru, Kota Banjarmasin belum dapat dilaksanakan dengan baik karena belum berhasil mencapai indikator dalam aspek kepatuhan, masih ditemukan adanya ketidakpatuhan pihak terkait dalam melaksanakan tugas penyaluran. Aspek rutinitas dan fungsi, pelaksanaan fungsi masih tidak tepat sesuai dengan kebijakan berupa penyaluran pada masyarakat yang tidak tergolong prioritas. Aspek kinerja dan manfaat, sebagian pihak yang belum terpenuhi jika mengacu pada isi dari kebijakan yang ada.

2. Dini Andini (2023) Universitas Islam Negeri Syekhali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam skripsi berjudul” **Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**”

Latarbelakang masalah dalam penelitian ini adalah kelangkaan LPG 3 Kg yang sering terjadi di masyarakat Kecamatan Siabu. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 tentang pendistribusian gas tabung 3 kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal). Penelitian ini menggunakan teori Field Research (2014). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) belum terimplementasikan secara optimal di lapangan. Hal ini disebabkan karena pangkalan menjual secara bebas LPG 3 kg kepada masyarakat. Adapun perbandingan penelitian terdahulu dengan penulis dari segi persamaannya adalah dari jenis metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu teori dari Ripley dan Franklin (1982), sedangkan penulis menggunakan teori dari Jan Merse dalam (Reno Affrian, 2023:47-48). Lokasi penelitian terdahulu di Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin. Sedangkan lokasi penulis di Desa Longkong dan Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Friedrich (Agustino, 2012:7) bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan tindakan yang diusulkan oleh sekelompok orang dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana kebijakan tersebut agar bisa berguna dalam mengatasi dan mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik menurut Anderson (Agustino, 2012:7) mengemukakan pendapat tentang kebijakan publik dalam buku *public policy making*, sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperintahkan dengan konsep kebijakan yang menitik beratkan pada apa yang dikerjakan dari apa yang diusulkan dan dimaksudkan. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada”.

Menurut Hayat (2018:11) Kebijakan adalah sebuah keputusan – keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan – kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan di pertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah. Kebijakan juga diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan

tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Suatu kebijakan dibuat dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Menurut Dye (Hayat, 2018:11) mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Dilakukan sebuah kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebijakan publik.

b. Aktor-Aktor Kebijakan Publik

Menurut Anderson (Agustino, 2022:25) sebagai kebijakan publik menerapkan aktor kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Aktor Negara
- 2) Aktor Non-Negara

c. Proses Formalasi Kebijakan Publik

Menurut Winarto (Anggara, 2018:189) sebagai kebijakan publik menerapkan proses formalasi kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Perumusan Masalah Kebijakan
- 2) Penyusunan Agenda Pemerintah
- 3) Perumusan Usulan Kebijakan
- 4) Pengesahan Kebijakan

Menurut Nugroho (Hayat, 2018:24) memberikan landasan penting dalam proses kebijakan publik, bahwa dalam kebijakan memiliki urutan dalam prosesnya, yaitu:

- 1) Kepercayaan akan kebaikan
- 2) Nilai-nilai dan norma-norma
- 3) Institusional politik
- 4) Proses politik
- 5) Kinerja atau kegagalan kebijakan menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan publik.

d. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2012:46) fungsi dari negara ialah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan penting kebijakan pemerintah yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban umum.
- 2) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal.

e. Model – Model Kebijakan Publik

Menurut Thomas (Reno Affrian, 2023:11-19) Kebijakan publik terdiri dari beberapa model-model formulasi kebijakan publik yaitu:

- 1) Model Teori Kelompok (Group)
- 2) Model Kelembagaan
- 3) Model Teori Elit (Elite)
- 4) Model Proses
- 5) Model Teori Rasionalisme (*Rational*)
- 6) Model Inkrementalis
- 7) Model Teori Permainan
- 8) Model Pilihan Publik

9) Model Demokrasi

f. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Rahayu (2016:26-30) ada berapa tahap kebijakan publik yaitu:

- 1) Pendefinisian Masalah (*Problem Definision*)
- 2) Penentuan Agenda (*Agenda Setting*)
- 3) Perumusan Alternatif Kebijakan (*Policy Formulation*)
- 4) Pemilihan Alternatif Kebijakan (*Policy Adoption*)
- 5) Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Implementation*)
- 6) Pernilaian Kebijakan (*Policy Evaluation*)

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Horn (Agustino, 2022:146) berpendapat bahwa implementasi merupakan tindakan -tindakan yang di lakukan oleh individu-individu, kelompok-kelompok, pejabat-pejabat, pemerintah ataupun swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2022:146) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan ekecutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Sedangkan menurut Pramono Sos, (2020:26) implementasi kebijakan adalah suatu hal penting dalam pembuatan kebijakan suatu mekanisme penjabaran keputusan-

keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi. Implementasi ini menyangkut masalah konflik, keputusan dalam suatu kebijakan tersebut.

b. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Rahayu (2016: 159) ada berapa tahap implementasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan keputusan dasar, (undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif yang penting), atau keputusan pengadilan.
- 2) Keputusan mengidentifikasi masalah, tujuan, sasaran yang jelas akan dicapai, berbagai implementasinya. cara untuk mengatur proses.
- 3) Implementasi berlangsung dalam proses dengan tahapan tertentu (pengesahan undang-undang menjadi output, keputusan atau aksi).
- 4) Pelaksanaan keputusan.
- 5) Kesiapan melaksanakan dari kelompok-kelompok sasaran.
- 6) Ada dampak yang di persepsikan oleh badan-badan *decision making* (pengambilan keputusan).
- 7) Perbaikan-perbaikan penting yang dilakukan oleh perumus kebijakan.
- 8) Rekomendasi untuk revisi atau melanjutkan kebijakan tersebut atau mengubah dalam bentuk suatu kebijakan baru (*a new policy*).

Sedangkan menurut Jan Merse (Reno Affrian, 2023:47-48) Implementasi kebijakan tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau

partisipasi masyarakat sebagai pemantau kepentingan. Teori ini ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu:

1) Informasi

Menurut Hasbullah (2015:47) informasi adalah sebagai sarana yang sangat penting dalam penyatuan pemahaman visi dan misi dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Informasi akan efektif jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan saling terbuka. Jika terjadi kurang penyaluran informasi maka masyarakat akan mendapatkan kurang tepat dari isi kebijakan yang dilaksanakan. Informasi merujuk pada ketersediaan, ketepatan, dan kelancaran data serta para yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa informasi yang baik, maka kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik.

2) Isi Kebijakan

Menurut Hasbullah (2015:47) kebijakan publik adalah upaya untuk mengatasi permasalahan publik, dengan demikian dari kebijakan yang diimplementasikan isi kebijakan harus jelas dan tegas yang mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodasi seluruh kepentingan. Implementasi kebijakan akan gagal jika isi kebijakan atau tujuannya atau terdapat ketidaktepatan atau juga ada ketidaktegasan internal atau eksternal di dalam kebijakan itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang sangat penting menyangkut sumber daya dalam kebijakan. Isi

kebijakan mengacu pada substansi, karakteristik dari kebijakan itu sendiri.

3) Dukungan Masyarakat

Menurut Hasbullah (2015:48) dukungan yang di pahami dalam hal ini adalah dukungan berupa fisik maupun non fisik. Jika dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kurang dukungan terhadap kebijakan tersebut maka kebijakan akan berlanjutan jika partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan evaluasi tinggi pada setiap kebijakan yang dikerjakan. Dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana kebijakan. Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya kebijakan pemerintah dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari pengambilan keputusan dan pengawasan dalam membantu pelaksanaan suatu kebijakan.

4) Pembagian Potensi

Menurut Hasbullah (2015:49) pembagian potensi ini pada hakikatnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intens diantara pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tentu bertujuan sebagai titik temu bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang dikerjakan karena setiap pelaku implementasi kebijakan memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda. Pembagian potensi adalah pembagian tugas, wewenang dan

tanggung jawab dalam implementasi kebijakan sehingga koordinasi antar organisasi sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

3. Peraturan Bupati

a. Pengertian Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat peraturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah, yang di dalamnya mengatur hal-hal spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti pengelolaan kearsipan, pemberian hibah dan bantuan sosial, atau tata cara pengalokasian dana desa.

b. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terutama pasal 136, dan juga merupakan fungsi delegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 2) Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- 3) Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

c. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain:

- 1) Membentuk Peraturan Daerah yang di bahas dengan kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan, program, atau peraturan berjalan sesuai dengan rencana.

d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup

1) Maksud Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pengendalian, pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 Kg bersubsidi secara tertutup agar tetap sasaran, efisien, dan efektif.

2) Tujuan Peraturan Bupati

a) Untuk memudahkan koordinasi antar instansi terkait dan pemerintah daerah. Memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah, dan masyarakat agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan.

b) Untuk melaksanakan pengendalian, pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi secara tertutup, baik kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi distribusinya.

3) Pengalokasian LPG tabung 3 kg bersubsidi sebagai berikut:

a) Jumlah alokasi kebutuhan LPG tabung 3 kg bersubsidi ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Menteri Energi sumber daya mineral.

b) Kebutuhan LPG tabung 3 kg bersubsidi diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.

- 4) Sistem distribusi LPG 3 kg sebagai berikut:
 - a) Sistem pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi adalah distribusi tertutup.
 - b) Jalur distribusi tertutup adalah dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) ke agen, kemudian ke pangkalan dan terakhir pangkalan ke pengguna.
 - c) Distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi di daerah diatur berdasarkan wilayah pendistribusian. Distribusi adalah mekanisme penyaluran LPG 3 kg dari pemerintah melalui jalur resmi agar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
 - d) Pengguna LPG tabung 3 kg bersubsidi adalah: a. Rumah tangga yang memenuhi kriteria layak menerima dan b. Usaha mikro yang memenuhi kriteria layak menerima.
 - e) Dikecualikan dari ayat (1) huruf a adalah rumah tangga adalah ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (PORKI).
 - f) Kriteria rumah tangga layak menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - g) Pengguna LPG tabung 3 kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu kendali.
- 5) Pelaksanaan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi sebagai berikut:
 - a) Setiap pangkalan wajib membuat buku kendali penjualan harian berdasarkan data rumah tangga miskin dan usaha mikro.

- b) Pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi secara tertutup dari Pertamina kepada konsumen meliputi: SPBE, Agen LPG 3 Kg dan Pangkalan LPG 3 kg.
- c) Agen LPG dalam mendistribusikan LPG tabung 3 kg bersubsidi secara tertutup kepada pangkalan berdasarkan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Pertamina.
- d) Konsumen diwajibkan menunjukkan kartu kendali, saat melakukan pembelian LPG tabung 3 kg bersubsidi untuk rumah tangga miskin.
- e) Setiap pangkalan wajib menyediakan LPG Non Subsidi untuk melayani konsumen yang tidak termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III (Reno Affrian, 2023:40) menjelaskan faktor keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:

a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus di informasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana

kebijakan (*policy implementor*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Sementara itu, dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

b. Sumber daya

Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), serta informasi dan kewenangan (*information and authority*). Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan. Sementara itu, dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup tentang

bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Disposisi

Disposisi adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dan lain-lain. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Operational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Tujuan

struktur birokrasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kebijakan berjalan tertib dan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Implementasi kebijakan menurut teori Merilee S. Grindle (Reno Affrian, 2023:46) dipengaruhi oleh dua variabel besar yang saling mempengaruhi, yaitu:

- 1) Isi Kebijakan
 - a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan
 - b) Tipe manfaat yang akan dihasilkan
 - c) Derajat perubahan yang akan diinginkan
 - d) Pelaksana kebijakan program
 - e) Sumber daya yang dikerahkan
- 2) Lingkungan Implementasi
 - a) Kekuasan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 - b) Karakteristik lembaga dan penguasa
 - c) Kepatuhan dan daya tangkap

Menurut teori G. Shabbil dan Rondinelli (Reno Affrian,2023:61) menjelaskan terdapat empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak program, yaitu:

- 1) Kondisi Lingkungan
- 2) Hubungan Antar Organisasi
- 3) Sumber Daya
- 4) Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Menurut model Donal van metter dan Carl Van Horn (Reno Affrian,2023:29-32). Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Carl Van Hom yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran kinerja implementasi kebijakan bisa dilakukan menggunakan tingkat keberhasilan dengan syarat bahwa ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran dan tujuan kebijakan tidak realistis untuk diterapkan di tingkat warga, pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan.

2) Sumber Daya

Keahlian untuk menggunakan sumber daya yang ada juga memainkan peran yang penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, manusia adalah sumber daya yang paling penting untuk menentukan keberhasilan implementasinya. Beberapa tahapan dalam proses implementasi menekankan tersedianya SDM yang kualitasnya sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan suatu kebijakan dan sudah ditetapkan secara politik. Dengan demikian, kehilangan kompetensi dan kapabilitas sumber daya bisa berdampak pada kinerja kebijakan publik. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat menuntun keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Perhatian utama difokuskan pada agen pelaksana, baik dalam bentuk organisasi formal maupun informal, yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini memiliki signifikansi penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan cocok dengan para agen pelaksana tersebut. Sebagai contoh, jika implementasi kebijakan publik bertujuan mengubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, agen pelaksana yang ditugaskan harus memiliki karakter yang tegas dan taat pada aturan serta sanksi hukum. Namun, jika kebijakan publik itu tidak memberikan pengaruh yang besar dalam mengubah perilaku dasar manusia, agen pelaksana bisa saja diturunkan sehingga tidak sekeras dan setegas contoh yang sebelumnya.

4) Sikap atau Kecendrungan (*diposition*) para pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari pelaksana memiliki pengaruh yang sangat banyak akan keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebab kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Namun, kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui atau bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang masyarakat ingin diselesaikan.

5) Komunikasi Antara Organisasi Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi dalang dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus juga memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

5. Pendistribusian

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang memiliki arti pembagian atau penyaluran secara terminologi, distubusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakainya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi saling terhubung antara satu dengan lainnya untuk melakukan

kegiatan. Menurut Daniel mengungkapkan bahwa distribusi adalah kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau pun jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut Tjiptono distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai yang diperlukan.

Ada beberapa alternatif jenis saluran yang dapat digunakan berdasarkan jenis produk dan segmen pasar, yaitu:

- a. Saluran distribusi barang konsumsi
- b. Saluran distribusi barang industri

6. Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Elpiji pelaparan bahasa indonesia dari akronik bahasa inggris LPG, Liquefied Petroleum Gas (gas minyak bumi yang dicairkan). Dengan menambahkan tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi komponen utamanya ialah gas propana dan butana kurang lebih 99% dan selebihnya ialah gas pentane yang dicairkan. Liquefied Petroleum Gas (LPG) Adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. LPG dikenal oleh Pertamina dengan merk Elpiji dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). LPG diharapkan bisa membantu masyarakat golongan bawah untuk menghemat pengeluaran dengan penggunaan LPG 3 kg dan mampu mengganti kelangkaan minyak tanah.

7. Pengawasan

Menurut Joko (2020:60-63) pengertian pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan pengendalian (*controlling*). Istilah ini memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan pengertian pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian "*controlling*" ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata "kendali", sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Pengawasan yang dilakukan dengan benar akan membawa fungsi perencanaan implementasi kebijakan publik makin jelas.

Menurut T. Hani Handoko pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan, hal itu dapat dilihat dalam kenyataan langkah awal proses pengawasan adalah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Joko (2020:60-63) Prinsip-prinsip pengawasan implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tercapainya Suatu Tujuan (*Principle of assurance of objective*)
- b. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*)

- c. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengawasan (*Principle of control responsibility*)
- d. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*)
- e. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*)
- f. Prinsip Standar (*Principle of standar*)
- g. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategi (*Principle of strategic control*)
- h. Prinsip dalam Pengawasan yang Fleksible (*Principle of flexibility of control*)

Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan atau langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang mengatakan ada beberapa proses pengawasan:

1. Menetapkan alat pengukur (*standard*)
2. Mengadakan penilaian (evaluasi)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*correctiveation*)

Menurut Joko (2020:63) tindakan yang dapat dilakukan dalam pengawasan imlementasi kebijakan publik adalah:

- a. Mengarahkan atau merekomendasi kebijakan publik
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dari penelitian sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah dalam penelitian.

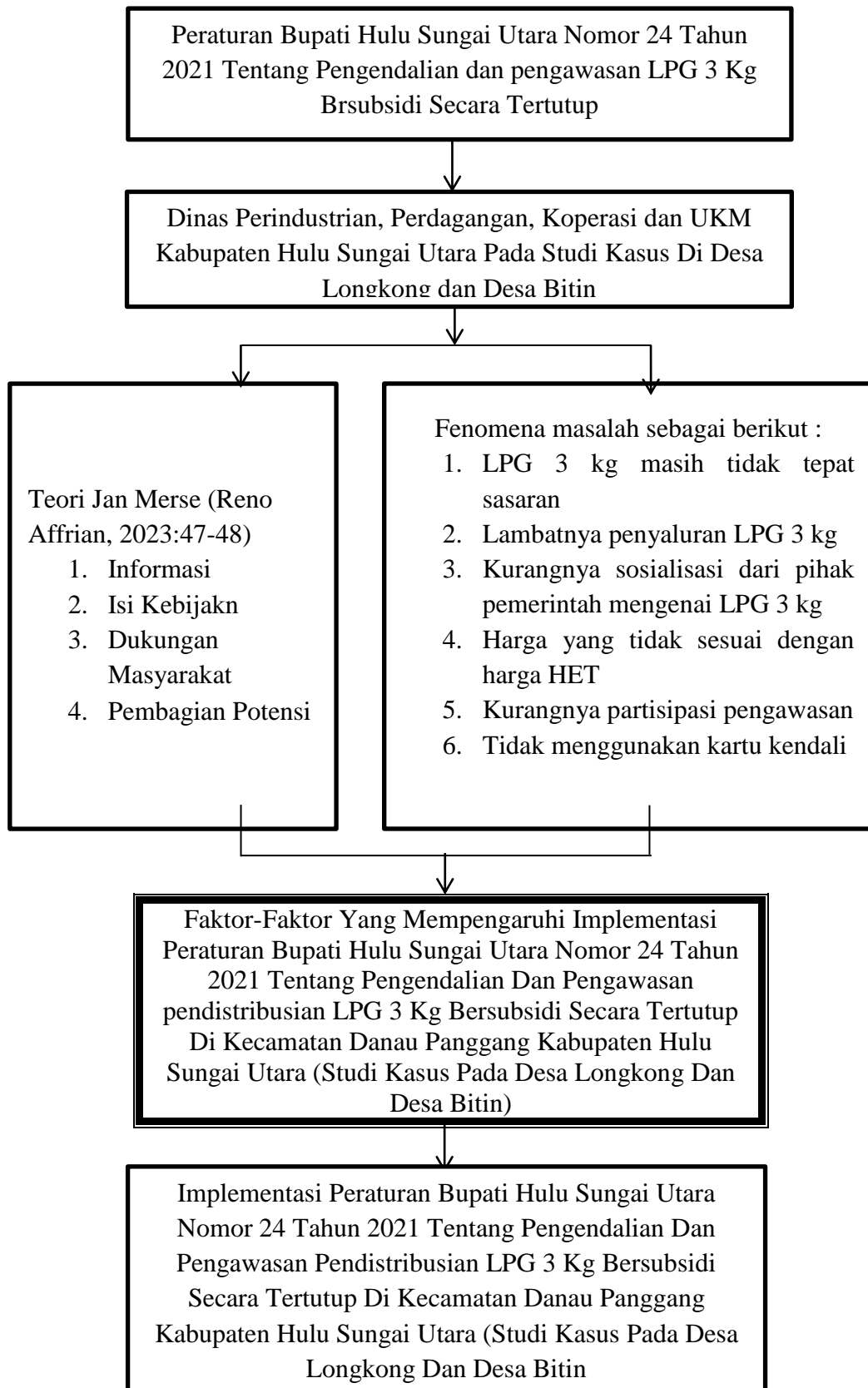
Kerangka Pemikiran ini sesuai dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin). Pendistribusian LPG Kg dilakukan oleh penyalur LPG 3 Kg. Penyalur merupakan koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan kegiatan penyaluran. Pendistribusian LPG 3 Kg di Desa Longkong yaitu Pertama lambatnya penyaluran LPG 3 Kg, Kedua LPG 3 Kg masih tidak tetap sasaran, Ketiga harga yang tidak sesuai dengan HET. Sedangkan Pendistribusian LPG 3 Kg di Desa Bitin yaitu Pertama kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai LPG 3 Kg, Kedua kurangnya partisipasi pengawasan, Ketiga tidak menggunakan kartu kendali.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil teori Implementasi Kebijakan menurut Jan Merse Reno Affrian (2023:47-48):

- a. Informasi
- b. Isi Kebijakan
- c. Dukungan Masyarakat
- d. Pembagian Potensi

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan pada Pangkalan LPG 3 Kg di Desa Longkong dan Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:9) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, proses, realitas sosial secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena yang diteliti. Dalam pendekatan penelitian kualitatif ini penulis berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan mengungkapkan secara jelas tentang Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin).

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:7) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Jadi, tipe penelitian deskriptif ini adalah suatu pendekatan yang berusaha menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin).

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Moleong (Ibrahim, 2018:66) data adalah kata-kata atau tindakan yang relevan dengan penelitian atau bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang berupa informasi dan fakta. Data dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2022:104) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Menurut Dameria (2023:53) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber responden di lapangan, khusus untuk kepentingan penelitian yang sedang dilakukan.

Data primer ini menggunakan metode seperti wawancara, observasi, kuisioner, dan eksperimen.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2022:104) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan apa yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dengan sumber acuan lainnya. Menurut Dameria (2023:53) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, data statistik, dan laporan instansi atau sumber lain yang sudah tersedia sebelumnya untuk membantu memperkuat hasil penelitian.

2. Sumber Data

Menurut Kaelan (Ibrahim, 2018:69) sumber data adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipasi, teman dan guru dalam penelitian. Sedangkan menurut Satori (Ibrahim, 2018:69) sumber data bisa berupa benda, orang, maupun nilai, atau pihak yang dipandang mengetahui tentang *social situation* dalam objek material penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber data dalam penelitian adalah orang, benda, objek yang dapat memberikan informasi, fakta, data, dan realitas yang terkait dengan apa yang diteliti. Menurut Sugiyono (2022:95) penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Tabel 3. 1
Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	Rusiana	Kepala Bidang Perdagangan
2	Zahratunnisa	Pangkalan Desa Longkong
3	Husin	Pangkalan Desa Bitin
4	Hj. Mahmudah	Pangkalan Desa Bitin
5	Jailani	Kepala Desa Longkong
6	Haris	Kepala Desa Bitin
7	Jum'ah	Masyarakat Desa Longkong
8	Hj. Saidatun Hasanah	Masyarakat Desa Longkong
9	Hana	Masyarakat Desa Longkong
10	Akla	Masyarakat Desa Bitin
11	Muthiah	Masyarakat Desa Bitin
12	Agustina	Masyarakat Desa Bitin
Jumlah		12 Orang

Sumber data: Dibuat oleh peneliti tahun 2025

E. Desain Operasional Penelitian

Membuat desain penelitian yang mengacu pada penelitian dan aspek yang diteliti. Desain operasional penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Adapun rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki

obyek penelitian. Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri.

Adapun desain operasional penelitian dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional

VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR
Implementasi Kebijakan Jan Merse (Reno Affrian, 2023:47-48)	1. Informasi	a. Adanya sosialisasi b. Kejelasan informasi kebijakan
	2. Isi Kebijakan	a. Tujuan kebijakan b. Kejelasan isi kebijakan
	3. Dukungan Masyarakat	a. Dukungan masyarakat b. Keterlibatan masyarakat
	4. Pembagian Potensi	a. Koordinasi b. Keberhasilan implementasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2022:104) teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjangkau informasi sesuai lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nasution (Sugiyono, 2022:106) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Menurut Hardani (2020: 125) observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2022:114) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam melakukan wawancara ada beberapa macam yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, wawancara tak berstruktur. Sedangkan menurut Kartono (Gunawan, 2015:160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dalam proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Menurut Sugiyono (2022:124) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sedangkan menurut Bogdan (Sugiyono, 2022:125) menyatakan bahwa “hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, atau autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Sedangkan menurut Bungin (Gunawan, 2015:177) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memeriksa atau menggunakan berbagai bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, video, rekaman, dan catatan tertulis.

G. Teknik Analisi Data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2022: 132-142), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat empat teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Pengumpulan

data dengan observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh akan banyak.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchat dan sejenisnya. Sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut sugiyono (2022:185-193) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, *triangulasi*, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif dan mengadakan *member check*.

1. Perpanjang pengamatan

Melakukan kajian ulang ke lokasi penelitian, melanjutkan observasi, wawancara dan sumber data yang sudah dikenal sebelumnya serta yang baru ditemui. Tindakan perpanjangan observasi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara peneliti dan narasumber, meningkatkan kesamaan persepsi. Meningkatkan keterbukaan dan memperkuat saling kepercayaan, sehingga semua informasi dapat tersampaikan dengan jujur.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, data dan kronologi peristiwa dapat tercatat dengan akurat dan terorganisir.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data

untuk mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan *triangulasi* waktu dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jika tidak data yang menyimpang lagi, hal ini menandakan bahwa data yang ada dapat dipercaya. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen *otentik*, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Tujuannya agar data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan memiliki bukti pendukung sehingga hasil penelitian menjadi lebih terpercaya.

6. Mengadakan *Member check*

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk menjamin konsistensi informasi yang diperoleh dengan informasi yang diberikan informan. Penulis membuat analisis komparatif terhadap kedua sumber tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Liqueified Patrolem Gas Tabung 3 Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup.
- Affrian, R. (2023) *Model Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Agustino, Leo. (2012) *Dasar Dasar Kebijakan Publik* cetakan X Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2018) *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Agustino, Leo. (2022) *Dasar Dasar Kebijakan Publik* cetakan X Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Hulu Sungai Utara (2022). *Kecamatan Danau Panggang Angka Subdistrict In Figures*. Penerbit: Bps Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bella Tasya, A. (2023) Universitas Lambung Mangkurat dalam skripsi berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan LPG 3 Kg Di Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin.
- Dewi, Rahayu Kusama. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV PustakaSetia
- Dini Andini, 2023. Tersedia : <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9762>
- Gunawan, Imam (2015) *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayat. 2018. *Kebijakan publik (Evaluasi, Reformasi dan Formulasi)*. Malang: Intransi Publishing.
- Hardani, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka ilmu.
- Hasbullah, H. 2015. *Kebijakan Pendidikan : Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*.
- Ibrahim, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sinaga, Dameria. 2023. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UKI Press

Tim Penyusun. (2022). *Buku Pedoman Penyusun Dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Penerbit: STIA Amuntai.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta:
Bumi Askara.